

Peningkatan Potensi Ekonomi Desa melalui Program Belanja Digital Produk BUMDes pada E-Katalog

Enhancing Village Economic Potential through Digital Shopping Programs for BUMDes Products on the E-Catalog

Rio Pongpadati¹, Adhilia Mega Cahyaningrum^{2,3}, Novia Causal Wismaya Rakhim³

¹Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

²Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

³Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

E-mail: ¹riopongpadati@gmail.com, ²adhiliamegac@student.uns.ac.id,

³noviacausalwismaya@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan untuk mempercepat pembangunan desa melalui kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagian besar BUMDes namun masih menghadapi kendala, terutama rendahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) akibat keterbatasan akses pasar. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan *pilot project* “Belanja Digital Produk BUMDes” untuk menjawab tantangan tersebut. Program ini bertujuan menyediakan portal digital agar produk BUMDes dapat masuk ke pasar pengadaan barang/jasa pemerintah, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan kontribusi terhadap PADes. Program berlangsung pada September–Desember 2023 menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) melalui tahapan pemetaan kebutuhan, seleksi BUMDes, pembuatan etalase khusus dalam portal E-Katalog, serta asistensi teknis. Para penulis merupakan bagian dari Tim Kerja Teknis yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal yang terlibat langsung dalam perencanaan, pendampingan, dan implementasi program. Hasil menunjukkan produk dari lima BUMDes berhasil tayang dalam E-Katalog, digunakan oleh beberapa satuan kerja pemerintah, serta menghasilkan transaksi senilai Rp19.488.350 dalam waktu 4 bulan. Program ini mampu memperluas akses pasar, meningkatkan visibilitas produk lokal, dan memperkuat eksistensi BUMDes dalam pengadaan pemerintah. Temuan ini membuktikan bahwa digitalisasi pengadaan terbukti menjadi strategi efektif dalam pemberdayaan ekonomi desa.

Kata kunci: BUMDes, E-Katalog, Pengadaan Barang/Jasa.

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) were established to accelerate village development through community economic activities. Most BUMDes, however, still face obstacles, primarily due to their low contribution to Village Original Income (PADes), resulting from limited market access. The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration carried out a pilot project, "Digital Shopping for BUMDes Products," to address these challenges. This program aims to provide a digital portal that enables BUMDes products to enter the government goods/services procurement market, expand their marketing reach, and increase their contribution to PADes. The program took place in September-December 2023 using the Participatory Action Research (PAR) method through the stages of mapping needs, selecting BUMDes, creating a special storefront in the E-Catalog portal, and technical assistance. The authors are part of the Technical Working Team assigned by the Secretary General who is directly involved in the planning, mentoring, and implementation of the program. The results showed that the products of five BUMDes were successfully published in the E-Catalog, used by several government work units, and resulted in transactions worth IDR 19,488,350 within 4 months. This program is able to expand market access, increase the visibility of local products, and strengthen the existence of BUMDes in government procurement. These findings prove that procurement digitalization has proven to be an effective strategy in village economic empowerment.

Keywords: BUMDes, E-Catalogue, Procurement.

1. PENDAHULUAN

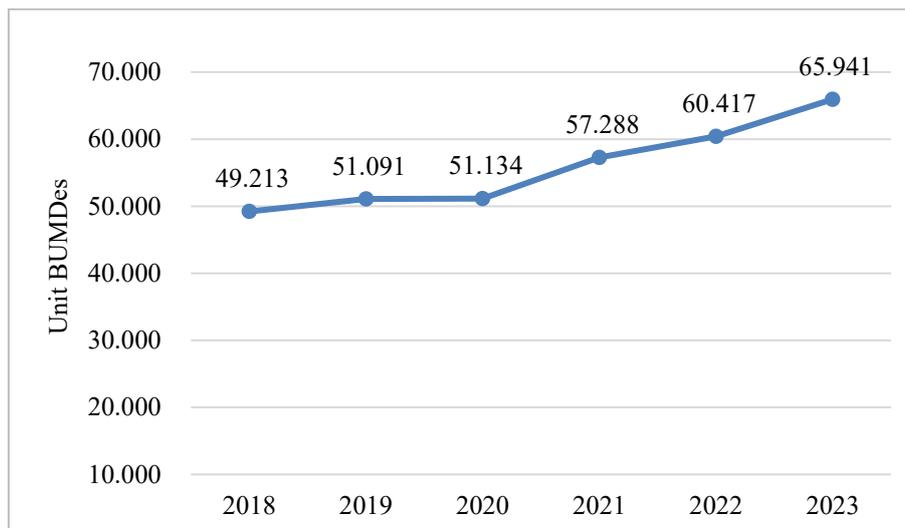
Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus gencar diimplementasikan di seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan ekosistem pemerintahan berbasis *E-Government* yang lebih transparan [1]. Salah satu lokus SPBE yang banyak mendapat perhatian adalah sektor pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan aplikasi *E-Katalog* atau Katalog Elektronik. *E-Katalog* merupakan portal belanja daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam menunjang operasionalisasi dan pelaksanaan program kerja. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pemanfaatan *E-Katalog* merupakan sebuah mandat untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Proyeksi transaksi belanja Pemerintah melalui *E-Katalog* dari tahun ke tahun terus meningkat dengan nominal yang besar. Tabel 1 berikut menunjukkan data pemanfaatan *E-Katalog* oleh instansi pusat dan daerah berdasarkan laporan LKPP tahun 2023.

Tabel 1. Rekapitulasi Pemanfaatan *E-Katalog* Tahun 2021 s.d. 2023

No	Tahun	Jml Produk Tayang	Jml Transaksi	Nominal Transaksi (Rp)
1.	2021	32.041	277.084	48.941.628.251.741
2.	2022	2.249.362	519.579	79.061.716.346.297
3.	2023 (Semester 1)	2.841.115	742.020	91.164.266.813.989

Transformasi digital melalui *E-Katalog* tidak hanya relevan bagi revitalisasi pengadaan di sektor pemerintahan, tetapi juga berpeluang untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan, salah satunya adalah pemerataan ekonomi desa yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2023) menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 terdapat 11.180 desa (15,03%) yang masih terkategori sebagai Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Kondisi ini mencerminkan bahwa pembangunan desa belum sepenuhnya optimal dan menjadi isu krusial yang mendesak untuk ditangani guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional [4]. Apabila permasalahan sosial ekonomi di perdesaan dapat teratasi, maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia pun juga akan terselesaikan sebab dari segi kewilayahan, 91 persen wilayah Indonesia adalah perdesaan [5]. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan desa melalui implementasi berbagai program dan kebijakan, salah satunya adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa BUMDes merupakan instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjalankan kegiatan ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat meningkatkan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat [7]. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, BUMDes juga diharapkan dapat memberi manfaat non-ekonomi lainnya bagi masyarakat desa [9].

Sampai tahun 2023, telah hadir 6.941 BUMDes yang bergerak di berbagai unit usaha mulai dari pariwisata, perdagangan, jasa, produksi pertanian, perkebunan, peternakan, barang sembako, dll. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan semakin besarnya dukungan dan kesempatan dari pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui kelembagaan BUMDes. Gambar 1 menyajikan grafik perkembangan jumlah BUMDes yang tercatat sejak tahun 2018-2023 berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2023.



Gambar 1. Jumlah BUM Desa/BUM Desma Tahun 2018-2023

Fungsi utama BUMDes dalam sektor ekonomi adalah sebagai lembaga usaha penghasil Pendapatan Asli Desa (PADes) yang kemudian dapat mendanai berbagai aktivitas pembangunan desa [10]. Namun, tingginya jumlah BUMDes yang beroperasi belum diiringi oleh tingkat profitabilitas yang memadai, sehingga banyak BUMDes yang tidak mampu memberikan bagi hasil usahanya ke PADes. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2023, dari total 65.941 unit BUMDes, hanya 13% atau sekitar 8.356 BUMDes yang memberikan bagi hasil keuntungannya ke PADes, sisanya sekitar lebih dari 80% unit tidak ada bagi hasil yang dikontribusikan. Bahkan rata-rata nilai bagi hasil yang disetorkan ke desa masih relatif rendah, yakni sebesar Rp4.083.451 per tahun.

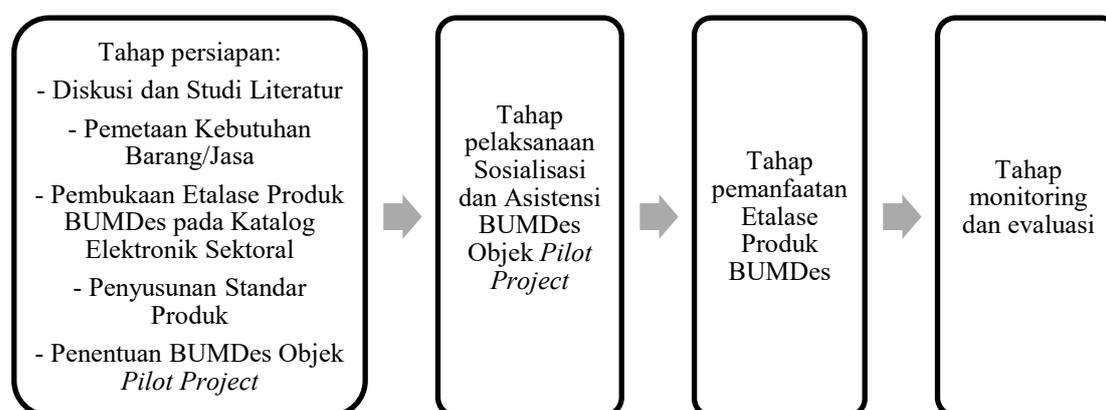
Selain karena SDM yang belum optimal [11] dan tingginya ketergantungan pada permodalan pemerintah [12], faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan BUMDes adalah karena selama ini banyak BUMDes yang belum dapat memperluas jangkauan pemasaran dan juga kurangnya *exposure* (paparan) kepada masyarakat yang lebih luas [13], padahal potensi produk-produk lokal desa yang dikelola oleh BUMDes sangat besar, pasar konsumen di Indonesia pun sangat luas. Selaku instansi pembina BUMDes, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertanggungjawab untuk memberdayakan BUMDes melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satu program peningkatan kapasitas BUMDes yang tengah diupayakan adalah melalui belanja digital produk BUMDes pada E-Katalog. Secara garis besar, program ini menjembatani produk-produk lokal desa yang dikelola oleh BUMDes untuk masuk ke pasar pemerintah melalui portal digital bernama E-Katalog. Portal tersebut dapat menjadi sarana bagi BUMDes untuk dapat masuk ke pasar digital dan menjangkau APBN/APBD yang setiap tahun nominalnya terus meningkat. Nantinya, potensi belanja APBN/APBD tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku usaha swasta, namun juga oleh pelaku usaha desa melalui BUMDes. Sejak tahun 2020, BUMDes telah memperoleh kemudahan mendaftar sebagai Badan Hukum, yang menjadi syarat pengajuan perizinan usaha untuk masuk menjadi Penyedia/Rekanan/Penjual di E-Katalog. Kemudahan tersebut meminimalisir kendala administratif sebelum *pilot project* ini dimulai.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dalam rangka mendorong pertumbuhan iklim usaha secara digital dan memperluas jangkauan pemasaran produk-produk BUMDes, Kementerian Desa PDTT melaksanakan *pilot project* program yang selanjutnya disebut dengan “Belanja Digital Produk BUMDes”. Tujuan utama dari program ini adalah menyediakan portal digital yang memungkinkan BUMDes masuk ke pasar pengadaan barang/jasa pemerintah dan memasarkan produk lokal yang mereka kelola. Program ini tidak hanya menyiapkan sarana digital, tetapi juga memberikan asistensi serta pelatihan bagi pengelola BUMDes hingga mereka mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Melalui terbukanya akses pemasaran digital yang

lebih luas, maka BUMDes dapat secara efektif mengembangkan potensi usaha dan meningkatkan profitabilitas [14]. Peningkatan profitabilitas akan menaikkan angka kontribusi BUMDes ke PADes, di mana kenaikan PADes kemudian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya Desa Mandiri [15].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), yaitu sebuah metode yang melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi [16]. Melalui metode ini, para penulis terlibat langsung sebagai bagian dari Tim Kerja Teknis yang menerima penugasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melaksanakan program “Belanja Digital Produk BUMDes”. Penulis pertama bertindak sebagai ketua, penulis kedua sebagai sekretaris, dan penulis ketiga sebagai bendahara. Peran tersebut tidak hanya mencakup koordinasi dan pengelolaan program, tetapi juga keterlibatan aktif dalam perancangan, sosialisasi dan asistensi teknis kepada BUMDes, hingga penyusunan laporan. Program “Belanja Digital Produk BUMDes” dilaksanakan melalui beberapa tahapan/*milestone* sebagaimana dijabarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Metode Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program yang metodenya dijelaskan pada Gambar 2 dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember tahun anggaran 2023. Proses dimulai melalui kegiatan *piloting* pada sejumlah BUMDes yang telah memenuhi kriteria kelayakan, baik dari aspek kualitas produk, tata kelola kelembagaan, maupun kelengkapan administrasi. Apabila hasil evaluasi terhadap *pilot project* menunjukkan capaian yang positif dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka program akan direplikasi secara lebih luas dengan melibatkan lebih banyak BUMDes serta memperluas jenis dan jumlah produk lokal desa yang ditayangkan pada etalase E-Katalog. Luaran utama dari program ini adalah tersedianya etalase khusus pada portal E-Katalog yang memuat beragam produk BUMDes, sehingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pelaksanaan Pilot Project

Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementing Unit/PIU*) dari *pilot project* “Belanja Digital Produk BUMDes” ini adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tim Kerja yang menjalankan proyek merupakan tim teknis yang secara langsung menerima penugasan dari Sekretaris Jenderal. UKPBJ memulai proses persiapan dengan pelaksanaan diskusi dan studi literatur guna merumuskan strategi implementasi yang tepat serta menyamakan persepsi dan pemahaman di antara anggota Tim Kerja. Tahap berikutnya adalah melakukan pemetaan

kebutuhan barang/jasa di lingkungan Kementerian yang dinilai berpotensi dapat diakomodasi oleh produk-produk BUMDes. Proses pemetaan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kementerian guna memperoleh data kebutuhan yang lebih lengkap dan representatif. Hasil dari kegiatan pemetaan tersebut menjadi landasan dalam penentuan kategori produk yang akan dibuka pada etalase E-Katalog khusus produk BUMDes. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, diketahui bahwa jenis barang/jasa yang memiliki potensi besar untuk disuplai oleh BUMDes adalah produk berupa suvenir atau cenderamata serta makanan dan minuman. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, selanjutnya dikembangkan sebuah sarana dalam bentuk Etalase khusus pada *platform* E-Katalog untuk menampung dan menampilkan produk-produk lokal dari BUMDes. Etalase ini diberi nama “BUMDes” yang beriringan dengan etalase etalase lain seperti produk UMKK, produk Inovasi, produk SNI, dll. Gambar 3 berikut menunjukkan tampilan etalase yang telah berhasil dikembangkan oleh Tim Kerja, menu tersebut dapat diakses melalui tautan <https://e-katalog.lkpp.go.id/landing>.



Gambar 3. Tampilan Etalase BUMDes pada E-Katalog

Secara paralel dengan proses penyusunan etalase “BUMDes” pada portal E-Katalog, Tim Kerja juga menyusun Dokumen Standardisasi Produk. Selain berfungsi sebagai panduan teknis untuk memastikan kualitas dan keseragaman produk yang akan ditayangkan di etalase, dokumen tersebut juga dijadikan sebagai dasar dalam menentukan unit BUMDes yang akan menjadi objek *pilot project*. UKPBJ kemudian melaksanakan proses penyaringan (*filtering*) terhadap BUMDes yang berpotensi untuk dilibatkan dalam program. Adapun kriteria seleksi BUMDes sebagai objek *pilot project* ditetapkan sebagai berikut:

- 1) **BUMDes berlokasi di Pulau Jawa**, dengan pertimbangan efisiensi akses dan kemudahan pelaksanaan asistensi teknis di lapangan;
- 2) **BUMDes telah memenuhi persyaratan legalitas formal**, yaitu memiliki Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum (AHU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama BUMDes, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencantumkan bentuk usaha sebagai Badan Usaha Milik Desa;
- 3) **BUMDes memproduksi dan/atau memasarkan barang/jasa** yang sesuai dengan klasifikasi KBLI sebagaimana tercantum dalam etalase “BUMDes”;
- 4) **Memiliki produk dengan kualitas dan kapasitas** yang telah sesuai dengan standar mutu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Standardisasi Produk yang telah disusun oleh Tim Kerja.

Berdasarkan hasil proses seleksi tersebut, diperoleh lima (5) unit BUMDes yang memenuhi seluruh kriteria dan ditetapkan sebagai objek *pilot project*. Daftar lengkap kelima BUMDes tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar BUMDes Objek *Pilot Project*

No	Nama	Alamat	NIB
1	BUMDesa Binangun Mitra Sejahtera	Desa Karangwuni, Kec. Wates, Kulonprogo, DI Yogyakarta	1210220013679
2	BUMDesa Karya Mandiri	Desa Nogran, Kec. Nglegok, Blitar, Jawa Timur	2003230031716
3	BUMDesa Bersama Sapta Anugerah Usaha	Desa Sumberpucung, Kec. Sumberpucung, Malang, Jawa Timur	1606239955762
4	BUMDesa Karya Usaha Bersama	Desa Tunggulrejo, Kec. Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah	706230017926
5	BUMDesa Tumang Cepogo	Desa Cepogo, Kec. Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah	0710210048292

Setelah unit BUMDes terpilih sebagai objek *pilot project*, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan asistensi secara langsung di lokasi masing-masing BUMDes. Adapun tujuan utama dari kegiatan sosialisasi dan asistensi tersebut meliputi:

- 1) Memberikan pemahaman kepada pengelola BUMDes mengenai konsep dasar E-Katalog, manfaat bergabung sebagai penyedia dalam sistem tersebut, serta tahapan umum proses pendaftaran sebagai penyedia/rekanan/penjual;
- 2) Mendampingi BUMDes dalam proses pendaftaran ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui portal <https://spse.inaproc.id/lkpp> sebagai prasyarat awal untuk dapat terdaftar sebagai penyedia di E-Katalog;
- 3) Memberikan bimbingan teknis terkait proses pendaftaran sebagai penyedia di E-Katalog, mulai dari penayangan produk pada etalase, mekanisme penerimaan pesanan dan negosiasi, hingga pemahaman alur pembayaran oleh instansi pemerintah.



Gambar 4. Sosialisasi dan Asistensi di BUMDes Objek *Pilot Project*

Hasil dari kegiatan sosialisasi dan asistensi yang dilaksanakan di lima lokasi BUMDes objek *pilot project* menunjukkan capaian positif berupa tayangnya produk-produk lokal BUMDes kategori makanan/minuman serta souvenir/cenderamata, pada Etalase “BUMDes” di portal E-

Tabel 3. Rekapitulasi Belanja Produk BUMDes melalui E-Katalog Sektoral
Per Desember 2023

No.	Satuan Kerja Kementerian	Jumlah Paket Pembelian	Nominal Transaksi (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	4	6.564.000,00
2	Inspektorat Jenderal	6	4.264.700,00
3	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	3	1.485.700,00
4	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	4	2.317.500,00
5	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	-	-
6	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	4	4.274.450,00
7	Badan Pengembangan SDM dan Pembangunan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-	-
8	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	582.000,00
TOTAL		22	19.488.350,00

Meskipun hingga akhir tahun 2023 belum seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memanfaatkan Etalase untuk belanja produk BUMDes, namun kehadiran etalase “BUMDes” yang didukung oleh regulasi formal telah menunjukkan potensi sebagai sarana pemasaran digital produk BUMDes yang efektif. Manfaat dari sisi BUMDes sebagai penyedia barang/jasa, program ini memberikan peluang peningkatan penjualan melalui akses pasar yang lebih luas dan mudah. Sementara itu, dari sisi satuan kerja pemerintah sebagai pemilik anggaran, kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi melalui mekanisme yang transparan dan terdokumentasi secara elektronik.

Memasuki tahun anggaran 2024, UKPBJ berkomitmen untuk mengakselerasi optimalisasi pemanfaatan etalase “BUMDes” melalui program replikasi yang melibatkan lebih banyak unit BUMDes dari berbagai wilayah. Diharapkan dengan adanya pelibatan yang lebih luas ini, produk lokal desa yang ditayangkan dalam etalase semakin beragam dan representatif terhadap potensi ekonomi seluruh desa di Indonesia. Seiring dengan semakin banyaknya produk BUMDes yang berhasil ditayangkan di dalam E-Katalog, arah pengembangan program selanjutnya difokuskan pada perluasan jangkauan pemanfaatan etalase tersebut oleh lebih banyak instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya ini bertujuan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk BUMDes melalui mekanisme belanja APBN dan APBD. Melalui partisipasinya dalam sistem pengadaan digital pemerintah, peran BUMDes sebagai media pemberdayaan ekonomi dan penjaga ketahanan ekonomi desa dapat semakin diperkuat. Transaksi digital melalui E-Katalog tidak hanya menjadi sarana transparansi belanja negara, tetapi juga alat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pilot project Program “Belanja Digital Produk BUMDes” yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terbukti menjadi solusi inovatif dalam menjawab tantangan rendahnya kontribusi BUMDes terhadap PADes karena kurangnya akses pemasaran produk lokal desa yang dikelola BUMDes. Melalui integrasi produk lokal ke dalam sistem pengadaan digital pemerintah (E-Katalog), program ini mampu memperluas akses pasar, meningkatkan eksposur produk lokal desa, dan mendorong peningkatan profitabilitas BUMDes. Keberhasilan *pilot project* yang melibatkan lima BUMDes terpilih menunjukkan bahwa pendekatan digitalisasi pengadaan dapat menjadi alat yang efektif bagi pelaku usaha desa untuk mengakses pasar sektor pemerintahan. Meskipun transaksi awal masih terbatas, dukungan regulatif dan komitmen untuk mereplikasi program di tahun anggaran berikutnya menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemberdayaan ekonomi desa secara berkelanjutan melalui mekanisme belanja pengadaan barang/jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. A. Sudirman and S. Saidin, "Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis," *Nakhoda J Ilmu Pemerintah*, vol. 21, no. 1, pp. 44–58, 2022, doi: 10.35967/njip.v21i1.269.
- [2] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Indonesia, 2021, pp. 1–12. [Online]. Available: <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-9-tahun-2021>
- [3] Kementerian Desa PDTT, "Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022," Jakarta, 2023.
- [4] R. Hilmawan *et al.*, "Rural Development from Village Funds, Village-Owned Enterprises, and Village Original Income," *J Open Innov Technol Mark Complex*, vol. 9, no. 4, p. 100159, 2023, doi: 10.1016/j.joitmc.2023.100159.
- [5] A. H. Iskandar, *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- [6] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Indonesia, 2014.
- [7] A. Prawitno, Rahmatullah, and Safriadi, "Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Gowa," *Krit J Ilmu Sos dan Ilmu Polit*, vol. 5, no. 2, pp. 50–60, 2019.
- [8] G. D. Larasdiputra, P. B. Anggiriawan, P. G. W. P. Kawisana, and I. G. B. N. P. Putra, "The Role of Village Owned Enterprises in Increasing the Rural Economy," *Int J Adv Soc Econ*, vol. 1, no. 2, pp. 60–66, 2019, doi: 10.33122/ijase.v1i2.41.
- [9] B. Badaruddin, K. Kariono, E. Ermansyah, and L. Sudarwati, "Village Community Empowerment through Village Owned Enterprise Based on Social Capital in North Sumatera," *Asia Pacific J Soc Work Dev*, vol. 31, no. 3, pp. 163–175, 2021, doi: 10.1080/02185385.2020.1765855.
- [10] A. S. K. Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *J Rural Dev*, vol. 5, no. 1, pp. 1–14, 2014.
- [11] I. I. Ali, I. T. Sutarna, I. Abdullah, K. Kamaluddin, and M. Mas'ad, "Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat," *Sosiohumaniora*, vol. 21, no. 3, pp. 349–354, 2019, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464.
- [12] D. Ambarwati, R. Safaa'at, S. Hamidah, and R. Sulistyarini, "Local Economic Development Concept: A Comparison between Indonesian Village-Owned Enterprises and Chinese Township and Village Enterprises," *Int J Soc Sci Res Rev*, vol. 6, no. 4, pp. 254–270, 2023, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1163>
- [13] H. Sidik, "Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari," *J Pengabd Kpd Masy*, vol. 4, no. 1, pp. 21–30, 2020.
- [14] R. Gumilar, R. R. S. Nurdianti, S. H. Sartika, and A. Srigustini, "Sosial Media dan Digital Marketplace sebagai Strategi Pemasaran BUM Desa," *J Inov Has Pengabd Masy*, vol. 6, no. 3, pp. 598–609, 2023, doi: 10.33474/jipemas.v6i3.19709.
- [15] A. E. Iftitah and P. Wibowo, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gowa," *J Ilmu Pemerintah Widya Praja*, vol. 48, no. 1, pp. 17–36, 2022, doi: 10.33701/jipwp.v48i1.2331.
- [16] A. Rahmat and M. Mirnawati, "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Aksara J Ilmu Pendidik Nonform*, vol. 6, no. 1, p. 62, 2020, doi: 10.37905/aksara.6.1.62-71.2020.

- [17] I. T. Puri and K. Khoirunurrofik, "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) for the Village Community Economy," *Econ Dev Anal J*, vol. 10, no. 1, pp. 12–21, 2021, doi: 10.15294/edaj.v10i1.40823.